PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RKP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2026

“JA ASAMANAM APCAMAR”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKP) RSUD Kabupaten Asmat Tahun 2026 dapat terselesaikan. Renja perubahan tahun 2026 ini disusun atas dasar arah kebijakan dan prioritas 2025-2029 yang tertuang dalam Recana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rancanagan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Perubahan 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat dalam waktu setahun mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 ini. Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar untuk tercapainya tujuan bersama

Agats, 28 Agustus 2026

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat

drg. YennyYokung Yong, MDSc, Sp.Perio
Pembina TK.I/ IVb
NIP. 19790124 200801 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iii
DAFTAR TABEL			iv
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	1
	1.3	Maksud dan Tujuan	5
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI RENJA TRIWULAN II		8
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II OPD	8
	2.2	Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3	Sumber Daya Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah	31
	2.4	Prestasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	35
	2.5	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	36
	2.6	Review Terhadap RKPD-P Tahun 2026	37
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		55
	3.1	Telaah Terhdap Kebijakan Nasional dan Daerah	55
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	60
	3.3	Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	69
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		70
	4.1	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	70
	4.2	Telaah Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71
BAB V	PENUTUP		85

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Triwulan II RSUD Kabupaten Asmat 10

Table 2.1. Rekapitulasi Jumlah Tempat Tidur RSUD perpetua J. Safanpo Tahun 2025 24

Table 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD RSUD 29

Table 2.3. Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo berdasarkan Jenis Kelamin 31

Table 2.4. Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo berdasarkan Pangkat 31

Table 2.5. Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (PNS) 32

Table 2.6. Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Honorer) 33

Table 2.7. Aset RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat 34

Table 2.8 Review terhadap RKPD Tahun 2026 39

Table 3.1. Telaah Arah Kebijakan dan Prioritas Bidang Kesehatan 60

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 61

Tabel 4.1 .Rencana Kerja Perubahan OPD RSUD Tahun 2026.....73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan RSUD.....22
Gambar 2.2 Alat-alat dan Gedung Kesehatan.....35
Gambar 2.3 Pelayanan Kesehatan.....36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Asmat, Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenAsmat telah menyusun Rencana Kerja PerubahanTahun2026.

Rencana Kerja PerubahanRumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2026 ini disusun melalui perencanaan dengan:

1) Pendekatan *bottom-up:* semua unit kegiatan dilingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan telah mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan menyusun rencana kegiatan dibawah koordinasi Seksi dan Sub. Bagian dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan.
2) Pendekatan *top down:* Perencanaan dilaksanakan dan diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan Nasional maupun daerah sebagaimana yang ada pada tujuan-tujuan pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs), Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPPD) Kabupaten Asmat tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja PerubahanRumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2026, meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. PMK No. 33 Tahun 2024tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Perangkat Daerah Kabupaten Asmat
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Asmat Nomor 36 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3.Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja PerubahanRumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2026, yaitu:

a. Berpedoman pada arah kebijakan, prioritas 2025-2029 yang tertuang dalam RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan tahun 2026;
b. Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan;
c. Mengidentifikasi kebutuhan unit-unit kegiatan dan merumuskan menjadi prioritas pelayanan;

d. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan dana pendapatan operasional Rumah Sakit;
e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pelayanan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja PerubahanRumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2026 adalah :

1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja PerubahanRumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit;
2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan antar sektor maupun Program Pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TRIWULAN II

2.1. Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Capaian Output Kegiatan Tahun 2025
2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indicator Kinerja Utama
2.3. Sumber Daya SKPD
2.4. Prestasi yang dicapai pada tahun 2025
2.5. Reviu terhadap rancangan RKPPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN

BAB III. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2.Telaah Usulan Program, kegiatan dan Sub kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan OPD Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis OPD

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2026, Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo memperoleh alokasi dana APBD dan BLUD sebesar Rp76.574.259.801,20yang terbagi dalam kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan perincian sebagai berikut :

a.	**Belanja Operasi**	Rp.	**74.585.751.901,20**
	Belanja Pegawai	Rp.	23.566.545.538,20
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	51.019.206.363,00
	Belanja Hibah	Rp.	0,00
b.	**Belanja Modal**	**Rp.**	**1..988.507.900,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	1.543.017.900,00
	Belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp.	445.490.000,00
	Belanja Modal jalan, jaringan, Irigasi	Rp.	0,00

Sedang komponen Belanja Langsung berbentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo, sehingga anggaran tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo.

Sampai dengan Triwulan II berjalan Anggaran Tahun 2026, dari anggaran sebesar Rp76.574.259.801,20terealisasi sebesar Rp20.937.486.238,00atau 27% dari anggaran yang ada.

Tahun anggaran 2026 OPD Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo juga mengelola pendapatan daerah. Adapun target pendapatan daerah sebesar Rp14.000.100.000,00(Empat Belas Miliar Seratus Ribu Rupiah). Pendapatan yang dapat dicapai Sampai dengan akhir Triwula II berjalan mencapai Rp5.664.801.486(Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Seribu Empat Ratus Delapan Enam Rupiah) atau sebesar 40.46%.

Rincian sumber dana tahun 2026Rp76.574.259.801,20bersumber dari APBD dan BLUDKabupaten Asmat, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.29.574.965.900,96, DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp.3.300.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp.4.291.604.140,00, Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.50.000.000,00, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp.3.979.519.000,00,Otonomi khusus sebesar Rp.13.594.691.100,00 yang terdiri dari Otsus 1% sebesar Rp.4.925.100.000,00dan Otsus 1.25% sebesar Rp.8.669.591.100,00,BLUD sebesar Rp.14.000.100.000,00,DBH Rokok sebesar Rp.1.000.000.000,00,dan DAK Non Fisik- BOK Kabupaten sebesar Rp.5.042.016.000,00

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo dan pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2026Triwulan II dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel T-C 29
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN ASMAT
Periode Pelaksanaan : Januari - Juni 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**411.210.983.155**		**76.012.029.257**		**76.544.264.164**		**8.031.265.518**		20.937.486.238,00						20.937.486.238,00		**20.937.486.238**				
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**170.903.586.250**		**29.462.424.438**		**34.390.604.057**		**5.098.987.287**		11.970.061.082,00						11.970.061.082,00		11.970.061.082,00				Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
			Meningkatnya layanan administrasi penunjang urusan RSUD	Nilai Hasil LKJP (SAKIP) (Angka)	397		78.930		79.00																	
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			89.300.000		17.404.580		17.600.000		-										-				
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah																							
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			37.500.000		7.429.968		7.500.000		-										-				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		1		1		1		1						1		1					
		1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan			50.000.000		9.974.612		10.000.000		-										-				

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		1		1						1		1				
1.02.01.2.01.0008		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1.800.000		-		100.000		-									-				
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		1		1						1		1				
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			111.301.950.250		18.566.860.727		23.544.049.901		3.977.897.112		8.918.348.379,00						8.918.348.379,00		8.918.348.379,00			
		Terlaksananya Belanja Pegawai dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah																						
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			111.264.450.250		18.559.395.829		23.536.549.901		3.977.897.112		8.918.348.379,00						8.918.348.379,00		8.918.348.379,00			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	635		132		127		127		127						127		127				

			(Orang/bulan)																					
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			37.500.000		7.464.898		7.500.000		-										-			
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1		1					1		1					
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.187.945.375		4.439.078.524		2.766.766.031		770.000		321.586.951,00						321.586.951,00		321.586.951,00			
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500.000.000		1.103.507.155		283.000.000		770.000		48.565.408,00						48.565.408,00		48.565.408,00			
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0		0					0		0					
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			195.913.725		-		236.424.062		-										0			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		3		0		0					0		0					
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			577.500.000		632.613.795		97.581.249		-										0			
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1		1		1		0		0					0		0					

			Disediakan (Paket)																					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.673.891.650		2.126.485.275		1.729.830.720		-		125.686.224,00						125.686.224,00		125.686.224,00			
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		4		0		0						0		0				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.000.000.000		356.469.229		188.300.000		-		27.126.146,00						27.126.146,00		27.126.146,00			
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.240.640.000		220.003.070		231.630.000		-		120.209.173,00						120.209.173,00		120.209.173,00			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		10		10		4		10						10		4				
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			224.390.625		-		44.878.125		-										-			
		Terlaksannya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			74.390.625		-		14.878.125		-													
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0				
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			150.000.000		-		30.000.000		-													

	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.100.000.000		6.439.080.607		8.017.310.000		1.120.320.175		2.730.125.752,00						2.730.125.752,00		2.730.125.752,00				
	Terlaksannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			350.000.000		131.677.300		71.250.000		1.940.235		27.988.944,00						27.988.944,00		27.988.944,00				
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0						1		1					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.750.000.000		608.423.807		858.860.000		199.357.940		382.572.308,00						382.572.308,00		382.572.308,00				
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		6						5		5					
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40.000.000.000		5.698.979.500		7.087.200.000		919.022.000		2.319.564.500,00						2.319.564.500,00		2.319.564.500,00				
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		5						5		5					
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**237.416.975.160**		**46.386.492.839**		**40.936.228.107**		**2.932.278.231**		8.967.425.156,00						8.967.425.156,00		8.967.425.156,00			Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi	500		100.000		100																	

			paripurna (%)																						
			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)	100		95.050		100																	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			84.623.816.396		15.581.790.995		15.627.626.999		27.638.029		321.117.433,00						321.117.433,00		321.117.433,00				
		Terlaksananya Penyediaan Sarana prasarana, Alkes, Obat-obatan dan Makanan Minuman pada Fasilitas Layanan Kesehatan																							
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			6.758.859.164		892.305.208		695.000.000		27.638.029		116.531.633,00						116.531.633,00		116.531.633,00				
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	500		127		100		15		15					15		15						
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			9.111.642.371		2.786.409.907		1.561.372.500		-														
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	20		23		75		0		0					0		0						

		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			7.281.699.876		897.140.666		1.100.000.000		-															
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	20		4		4		0		0					0		0				
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			7.844.340.140		206.493.000		504.472.876		-		35.000.000,00						35.000.000,00		35.000.000,00					
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		0		0					0		0				
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			53.627.274.845		10.799.442.214		11.766.781.623		-		169.585.800,00						169.585.800,00		169.585.800,00					

			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3		4		5		0		0						0		0					
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.832.506.092		30.396.754.714		24.942.911.908		2.862.497.402		8.522.098.323,00						8.522.098.323,00		8.522.098.323,00				
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan																								
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			784.261.069		-		-		-															
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50		0		0		0		0						0		0					
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			7.840.292.169		1.494.094.000		-		-															
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0					
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			21.952.818.074		3.907.302.980		4.231.240.000		-		1.182.988.050,00						1.182.988.050,00		1.182.988.050,00				
			Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil	1		2		1		0		0						0		0					

		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																						
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			78.402.922		-		1.315.000.000		-														
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0					
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			393.924.595		-		769.000		-														
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0					
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.568.522.138		283.140.000		263.340.000		263.340.000		263.340.000,00						263.340.000,00		263.340.000,00				
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	5		1		1		1		1						1		1					
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			99.339.735.399		21.082.007.954		15.613.387.908		1.952.305.540		5.167.710.004,00						5.167.710.004,00		5.167.710.004,00				
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	60		12		12		3		5						3		3					
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			575.124.784		97.988.421		19.175.000		-														
		Terlaksananya Akreditasi	Jumlah Fasilitas	1		1		1		0		0						0		0					

			Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)																							
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik				18.299.424.942		3.532.221.359		3.500.000.000		646.851.862		1.908.060.269,00						1.908.060.269,00		1.908.060.269,00				
			Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0					
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.829.942.494		407.947.130		335.689.200		42.142.800		119.162.400,00						119.162.400,00		119.162.400,00				
			Terlaksananya Pelayanan Dengan Menggunakan SIM-RS RSUD																								
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.829.942.494		407.947.130		335.689.200		42.142.800		119.162.400,00						119.162.400,00		119.162.400,00				
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0					
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				130.710.178		-		30.000.000		-		5.047.000,00						5.047.000,00		5.047.000,00				
			Terlaksannya Pengukuran Indikator Mutu Nasional Pada RSUD																								
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				130.710.178		-		30.000.000		-		5.047.000,00						5.047.000,00		5.047.000,00				
			Terlaksananya Peningkatan	Jumlah Fasilitas	1		0		1		0		0						0		0					

		Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)																						
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**2.627.656.132**		**148.111.980**		**1.217.432.000**		**-**													Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	500		100.000		100																	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.313.828.066		-		1.080.432.000		-														
		Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD																							
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			1.313.828.066		-		1.080.432.000		-														
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	15		0		3		3		3						3		3					
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.313.828.066		148.111.980		137.000.000		-														

			Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD																							
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.313.828.066		148.111.980		137.000.000		-															
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	6		30		5		0		0						0		0						
	1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**262.765.613**		**15.000.000**		**-**		**-**													Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	
			Meningkatnya Kulaitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)	100		95.050		100																
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			262.765.613		15.000.000		-		-															
			Terlaksananya Distribusi Obat dan BHP Medis E-Katalog pada RSUD																								
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			262.765.613		15.000.000		-		-															
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	1		1		0		0		0						0		0						

				Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)																					
	JUMLAH				**411.210.983.155**		**76.012.029.257**		**76.544.264.164**		**8.031.265.518**										**8.031.265.518**				
	Rata-rata capaian kinerja (%)																					**4,74**	**1,95**		
	Predikat kinerja																					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

2.2Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Utama

Pencapaian kinerja sasaran RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 2024dari 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator

a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat

Indikator dalam penilaian capaian sasaran kinerja antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambaran pencapaian kinerja sasaran RSUD berdasarkan indeks kepuasan masyrakat selama 6 tahun seperti tertuang pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.1
Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayan RSUD

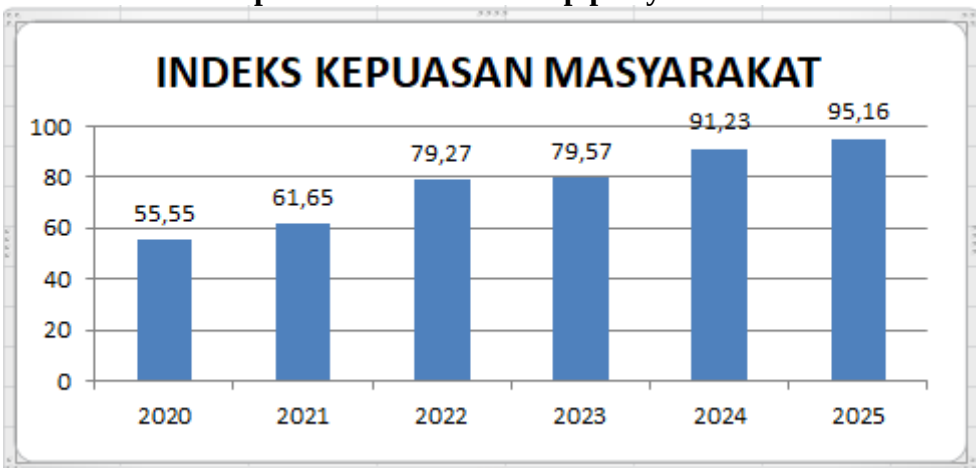

Sumber: Data Primer Survei Kepuasan Masyarakat rsud

Pembagian jarak kriteria yakni rendah Nilai 25 – 55, sedang Nilai 56-79 dan tinggi Nilai 80-100. Berdasarkan grafik diatas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD tiap tahunnya di Kabupaten Asmat mengalami kenaikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Pada Tahun 2025 Survei Kepuasan masyarakat memiliki nilai 95.16 masuk dalam criteria tiggi artinya telah mencapai target sehingga nilai kinerja untuk Indeks Kinerja Umum Indeks Kepuasan

Masyarakat yakni kategori **baik**. RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat merupakan Satu satunya Rumah sakit yang ada di Kabupaten Asmat yang melayani kesehatan rujukan. RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat berType D berdiri sejak tahun 2011, yang merupakan pengembangan dari Puskesmas perawatan Agats. Namun pada Tahun 2023 RSUD Agats Kabupaten Asmat telah direlokasi dan mengubah namanya menjadi RSUD Perpetua J. Safanpo Dalam hal layanan Kesehatan terdapat berbagai permasalahan terjadi karena:

a) Kondisi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat yang serba terbatas, terutama Air.
b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesadaran bahwa perawatan Sakit di Rumah Sakit memerlukan waktu penyembuhan penyakit yang sesuai standard.
c) Banyak Masyarakat yang meminta pulang dirawat sebelum waktunya dipulangkan oleh dokter.
d) Keterbatasan sarana dan prasarana, alat kesehatan dan tenaga kesehatan Dokter Spesialis di RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat
e) Masih tingginya angka Rujukan pasien akibat kurangnya dokter spesialis serta dibutuhkannya penanganan dari dokter subspesialis
f) Rendahnya sosial ekonomi masyarakat sehingga ketika dirawat yang untuk masyarakat papua gratis tetapi karena ketiadaan makan untuk anggota kelaurga yang menunggu sehingga meminta untuk pulang.
g) Tingginya beaya transportasi Rujukan baik dari Desa, Distrik ke RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat maupun dari RSUD Keluar Kabupaten Asmat

Langkah Pemecahan masalah kedepan:

a) Pembangunan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat di lokasi yang baru dengan kontruksi permanen dan penambahan jumlah tempat tidur, dan sarana prasarana penunjang lain.
b) Usaha Peningkatan Kelas RSUD dari Type D ke Type C
c) Penambahan Tenaga Kesehatan, Dokter Spesialis, dan Petugas Kesehatan lainya.
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai dengan perkembangan jaman.
e) Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang sesuai dengan perkembangan tehnologi dan pengetahuan.
f) Reviu Akreditasi RSUD untuk tetap mendapat predikat Akreditasi RS yang Paripurna.
g) Memberikan makan dan minum buat keluarga pasien rujukan
h) Mengalokasikan Anggaran perjalanan Rujukan ke RS Tujuan
i) Menyediakan Rumah Singgah dan makan minum untuk pasien Rujukan

2. Daya Tampung Rumah sakit

Diketahui bahwa secara keseluruhan daya tampung RS per satuan Penduduk termasuk dalam kategori **baik**, karena jumlah tempat tidur sebanyak 100 TT atau 100% dapat digunakan.

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Jumlah Tempat Tidur RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2024

NO	SETARA KELAS (VIP, I, II, III)	RUANGAN	JUMLAH TT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	VIP	Rawat Inap	4	
2	KELAS I	Ranap Inap	4	
		Perawatan Kebidanan	1	
3	KELAS II	Rawat Inap	16	
		Perawatan Kebidanan	4	
		Isolasi	1	

4	KELAS III	Rawat Inap Dewasa	16	
		Rawat Inap Anak	14	
		Perawatan Kebidanan	6	
		Isolasi	7	
		JUMLAH	**73**	
5	PERAWATAN INTENSIVE	ICU	7	
		NICU/PICU	3	
		Perinatologi	17	
		JUMLAH	**27**	
TOTAL			**100**	

Masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelayanan di RSUD terbatas dikarenakan:

a) Jumlah Dokter Spesialis pada tahun 2024 sangat terbatas dimana dokter spesialis dasar hanya tersedia 1 orang untuk masing-masing spesialisasi.

Langkah Pemecahan Masalah kedepan:

a) Pengusulan penambahan dokter spesialis dasar (Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Obgyn dan Spesialis Penyakit dalam) ke Kemenkes RI
b) Peningkatan kelas Rumah Sakit
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana, alat kesehatan.
d) Pelatihan Perawatan Intensive bagi tenaga ICU

3. Akreditasi Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, Gawat Darurat. Rumah sakit wajib membuat, melaksanakan, dan menjaga mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit sebagai acuan standar pelayanan terhadap pasien (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Oleh sebab itu, rumah sakit perlu meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Peningkatan mutu terhadap keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang tidak pernah berhenti dan harus selalu dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia, sehingga dapat sejajar dengan mutu rumah sakit di tingkat Nasional maupun Internasional.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi tersebut dilakukan oleh lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Berdasarkan Permenkes NOMOR HK.01.07/MENKES/1128/2022 TENTANG STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Pada bulan Desember 2021 Kementerian Kesehatan mencatat 3.120 rumah sakit telah teregistrasi. Sebanyak 2.482 atau 78,8% rumah sakit telah terakreditasi dan 638 rumah sakit atau 21,2% belum terakreditasi.

Proses penyusunan standar akreditasi rumah sakit diawali dengan pembentukan tim yang melakukan sandingan dan benchmarking standar akreditasi dengan menggunakan referensi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Joint Commission International Standards for Hospital edisi 7, regulasi perumahsakitan serta panduan prinsip-prinsip standar akreditasi edisi 5 yang dikeluarkan oleh The International Society for Quality in Health Care (ISQua). Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan melibatkan perwakilan dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, rumah sakit dan akademisi. Selanjutnya hasil diskusi tersebut dibahas lebih lanjut oleh panelis penyusunan standar akreditasi rumah sakit dengan mendapat masukan secara tertulis dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Penyusunan standar akreditasi rumah sakit mempertimbangkan penyederhanaan standar akreditasi agar lebih mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh rumah sakit.

Tujuan pengaturan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia dirumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah dibidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia dimata Internasional.

Tahun 2023 RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat telah melakukan akreditasi dengan nilai Paripurna artinya target akreditasi Rumah Sakit telah tercapai 100% masuk dalam kategori **Baik**. Program kedepan Akreditasi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat kedepan / di tahun 2025 adalah supervisi atas akreditasi paripuna yang ada apakah masih dalam predikat atau mutu pelayanan yang paripurna.

Dalam pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk mencapai visi Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo yang telah ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2021 - 2025.

Sesuai dengan tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo adalah sebagai berikut :

a. Tingkat hunian rawat inap RSUD efektif dan efisien.
b. Terlaksananya pelayanan spesialistik pada pasien rawat jalan dan rawat inap.
c. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna RSUD
d. Bertambahnya jenis layanan.
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional.
f. Meningkatnya rasio efektifitas pendapatan.
g. Terwujudnya efisiensi pendapatan
h. Akreditasi RSUD.

Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo dapat di lihat pada *tabel 2* di bawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD RSUD

Kabupaten Asmat

No	program / kegiatan	Indikator	SPM / Standar yang di tetapkan	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Urusan Wajib**												
1	**Bidang Urusan Kesehatan / RSUD**												
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Pelayanan Dan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan**			**100%**	**100%**	**100%**		**87.43%**	**92%**	**97%**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%		99.76%	99%	99%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			100%	100%	100%		88.14%	93%	95%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	100%	100%		0%	0%	0%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%		92.53%	93%	95%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%		83.26%	89%	90%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Rumah Sakit Yang Memenuhi Pelayanan Yang Memadai Serta Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			**75%**	**95%**	**95%**		**84.39%**	**87%**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	100%	100%		83.98%	87%	99%		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			100%	100%	100%		84.84%	88%	88%		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan			100%	100%	100%		75.15%	96%	98%		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota			100%	100%	100%		92.21.%	31%	75%		
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Pada RSUD**			**78%**	**100%**	**100%**		**25%**	**63%**	**65%**		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan			78%	100%	100%		25%	63%	63%		
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP Pada RSUD**			**100%**	**97%**	**100%**		**99.46%**	**100%**	**100%**		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Kadaluarsa			100%	97%	100%		99.46%	100%	100%		

2.3. Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD Perpetua J. SafanpoKabupaten Asmat dibutuhkanketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplinilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya. Berikut tabel Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo

Tabel 2.3
Pegawai RSUD Perpetua J. SafanpoKabupaten Asmat
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Lk	Pr	Jumlah	Ket
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	37	90	127	
2	CPNS	0	0	0	
3	PPPK	0	0	0	
4	NON ASN/ HONORER	73	131	204	
5	TOTAL	110	221	331	

Sumber : Badan Kepegawaian dn Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Secara keseluruhan personil yang ada saat ini berjumlah 331 orang dengan dengan jumlah laki-laki sejumlah 110 Orang atau 33.23% dan Perempuan sebanyak 221 Orang atau 66.77%, berdasarkan perbandingan di atas terlihat jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, serta perbandingan antara PNS dan Honorer yakni 1:1.6

Pegawai Negeri Sipil RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat apabila ditinjau dari sisi jenjang Kepangkatan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Pegawai RSUD Perpetua J. SafanpoKabupaten Asmat
Berdasarkan Pangkat

No	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Utama Muda / IVc	0	
2	Pembina Tk.I / IVb	1	
3	Pembina / IVa	4	
4	Penata Tk. I / IIId	9	
5	Penata / IIIc	18	
6	Penata Muda Tk. I / IIIb	32	

7	Penata Muda / IIIa	12	
8	Pengatur Tk.I / IId	5	
9	Pengatur / IIc	44	
10	Pengatur Muda Tk. I / IIb	0	
11	Pengatur Muda / IIa	2	
	TOTAL	127	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Dari table di atas dapat dijelaskan pegawai dengan jumlah terbanyak ada pada pangkat Penata Muda Tk.I/ IIIb dengan jumlah 32 Orang atau 25.19% sedangkan pegawai dengan jumlah sedikit pada pangkat Pengatur Muda/ IIa sebanyak 2 Orang atau 1.57%.

Pegawai Negeri Sipil RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat apabila ditinjau dari sisi jenjang Pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Pegawai RSUD Perpetua J. SafanpoKabupaten Asmat
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (PNS)

No.	Tingkat Pendidikan	Perempuan	Laki-Laki	Total	ket
1	S-3/Doktor	0	0	0	
2	S-2	5	8	13	
3	S-1/Sarjana	25	9	34	
4	Diploma IV	5	2	7	
5	Diploma III/Sarjana Muda	52	16	68	
6	Diploma II	0	0	0	
7	Diploma I	0	0	0	
8	SLTA Sederajat	3	2	5	
9	SLTP	0	0	0	
10	Sekolah Dasar	0	0	0	
11	TOTAL	90	37	127	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Dari table di atas dapat dijelaskan pegawai dengan jumlah terbanyak ada pada pendidikan Diploma III/ Sarjana Muda dengan jumlah 68 Orang atau 53.54% sedangkan pegawai dengan jumlah sedikit pada pendidikan SMA/SMK sebanyak 5 Orang atau 3.94%.

Pegawai Honorer pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat apabila ditinjau dari sisi jenjang Pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Honor)

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SPESIALIS BEDAH	0	0	0
SPESIALIS OBGYN	1	0	1
SPESIALIS PENYAKIT DALAM	0	0	0
DOKTER UMUM	6	6	12
DOKTER GIGI	1	0	1
APOTEKER	1	3	4
NERS	13	11	24
S1 KEPERWATAN	1	1	2
SKM	0	4	4
SARJANA FARMASI	2	3	5
SARJANA GIZI	1	2	3
SARJANA EKONOMI	1	0	1
DIII KEPERAWATAN	8	28	36
DIII PERAWAT KARDIO	0	1	1
DIII KEBIDANAN	0	31	31
DIV REKAM MEDIS	1	0	1
DIII REKAM MEDIS	1	1	2
DIII ANALIS	3	8	11
DIII FARMASI	0	0	0
DIII RADIOLOGI	0	2	2
DIII FISIOTERAPI	1	1	2
DIII ELEKTROMEDIK	2	0	2
DIII KESLING	0	2	2
DIII MANAJEMEN	0	1	1
DIII SEKERTARIS	0	1	1
DIII INFORMATIKA	1	0	1
SMA/SMK	23	20	43

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SMP	0	3	3
SD	4	1	5
TIDAK SEKOLAH	2	1	3
TOTAL	73	131	204

Sumber : Badan Kepegawaian dn Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pegawai honorer paling sedikit pada jenjang pendidikan DIII Informatika, DIII Sekertaris, DIII Manajemen,DIV Rekam Medis, DIII Perawat Kardio, Sarjana Ekonomi, Dokter gigi dan Dokter Spesialis Obgyn masing masing sebanyak 1 Orang atau 0.5% sedangkan pegawai honorer dengan jumlah terbanyak ada pada pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 43 Orang atau 21.08%.

B. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Perpetua J. SafanpoAgats. Sejauh ini ketersedaian sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh RSUD Perpetua J. Safanpodapat dikatakan belum memadai dan masih jauh dari cukup. Gambaran sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh RSUD Perpetua J. SafanpoKabupaten Asmat selanjutnya diuraikan dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.7
Aset RSUD Perpetua J. SafanpoKabupaten Asmat

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi				Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak ringan	Rusak berat			
A	PERALATAN DAN MESIN									
	ALAT BESAR									
1	Mesin Genset	Unit	1	1				2015	535.000.000	
2	Mesin Pemotong dan Penghancur Jarum Suntik	Unit	1	1				2020	97.773.000	
3	Mesin Genset	Unit	1	1				2020	1.492.500.500	
	ALAT-ALAT ANGKUTAN									
1	Mobil Ambulance	Unit	1	1				2014	548.800.000	
2	MOTOR VIAR	Unit	1	1				2018	61.050.000	
3	Mobil Ambulance	Unit	1	1				2018	495.127.324	
4	Gerobak Dorong	Unit	1	1				2019	10.000.000	
5	Sepeda	Unit	1	1				2021	3.800.000	
6	Mobil Ambulance	Unit	1	1				2021	423.335.350	

7	Sepeda	Unit	1	1				2021	3.800.000	
8	Sepeda	Unit	1	1				2021	3.800.000	
9	Sepeda	Unit	1	1				2021	3.800.000	
10	Mobil Ambulance	Unit	1	1				2021	423.335.350	
11	Sepeda	Unit	1	1				2021	3.000.000	
12	MOTOR VIAR	Unit	1	1				2023	79.997.700	
	ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1	Mesin Ketik Manual	Unit	1				1	2007	1.440.000	
2	Brankas	Unit	1				1	2007	3.200.000	
3	Meja Makan	Unit	1	1				2011	9.500.000	
4	Dst……									

Sumber : *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024*

2.4. Prestasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berhasil mencapai beberapa prestasi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. SKPD berhasil menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur tepat waktu dan sesuai anggaran serta pengadaan peralatan medis canggih yang mendukung diagnosa dan perawatan pasien secara lebih akurat dan cepat, yang berdampak positif pada peningkatan pelayanan serta penggunaan fasilitas bagi pasien-pasien rawat inap di RSUD.

Gambar 2.2. Alat-alat dan gedung Kesehatan

RSUD juga berhasil meningkatkan kepuasan pasien hingga 91.93% dan mampu meningkatkan penerimaan retribusi layanan kesehatan mencapai 146.46% melampaui target. Semua pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh staf rumah sakit dalam mewujudkan visi dan misi pelayanan kesehatan yang prima.

Gambar 2.3. Pelayanan pada RSUD

2.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa isu strategis utama untuk tahun 2025 yang mengemuka baik yang berskala nasional maupun regional Papua Selatan dan Kabupaten Asmat, antara lain:

a. Isu berskala Nasional:
   1) Pembangunan Sumber Daya Manusia,
   2) Pembangunan infrastruktur,
   3) Penyederhanaan Regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law;*
   4) Penyederhanaan Birokrasi,
   5) Transformasi Ekonomi,

b. Isu berskala regional Papua Selatan:
   1) Penguatan transisi kelembagaan pemerintah daerah provinsi papua selatan menuju satu pemerintahan definitive yang siap melaksanakan pelayanan public;
   2) Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim;
   3) Percepatan peningkatan kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan;
   4) Percepatan pemulihan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan penyerapan tenaga kerja local
   5) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas

c. Isu berskala regional Kabupaten Asmat:
   1) Penguatan ekonomi local berbasis pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya local,
   2) Peningkatan skil dan partisipasi masyarakat dalam sector ekonomi,
   3) Pengentasan kemiskinan,
   4) Konektivitas wilayah,
   5) Pembangunan pusat pemerintahan baru,
   6) Infrastruktur (focus pembangunan akses bandara dan lingkar kota).

Namun demikian kondisi perekonomiandi wilayah kabupaten Asmat pada tahun 2025 yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan serta komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo untuk mewujudkan "**Menjadi Rumah Sakit Daerah Dengan Kualitas Pelayanan Kesehatan Berstandar Nasional"** untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

2.6. Review Terhadap RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja PerubahanRumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 dalam RPJPD yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan tolak ukur capaian program Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat.

Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2026 didasarkan pada status Rumah Sakit sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

***Tabel :2.8** Review terhadap RKPD Kabupaten Asmat Tahun 2026*

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KAB. ASMAT
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D							80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96							85.227.592.891,55	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96							85.227.592.891,55	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96							85.227.592.891,55	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Layanan Administrasi Penunjang Urusan RSUD				100 %	100 %	32.114.297.414,39	34.390.604.056,96	34.400.414.056,96							36.806.444.391,55	
						[Presentase Administrasi Penunjang Urusan RSUD]	Nilai Hasil LKJP (SAKIP)	79.80	78.93	78.93			32.114.297.414,39	34.390.604.056,96	34.400.414.056,96						79.00	36.806.444.391,55	

	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	1	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Asmat, Agats, Kaye	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			360.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																

	1	02	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	1	02	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			7.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	1	02	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	1	02	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan																

						Kantor															
	1	02	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
	1	02	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	1	02	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	1	02	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	20 Laporan	248.128.000,00	231.630.000,00	346.440.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			248.128.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			30.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000.000,00	7.087.200.000,00	6.619.570.361,52	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			8.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				12 Bulan	95 %	48.495.671.835,61	40.936.228.107,00	54.209.479.312,00							46.823.066.500,00	
						-																	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sarana prasarana, Alkes, Obat-obatan dan Makanan Minuma	-			95 %	95 %	19.371.267.035,61	15.627.626.999,00	15.627.626.999,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Asmat		16.706.586.367,03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

							n Pada Fasilitas Layanan Kesehatan															
	1	02	02	2.01	00 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan															
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				-	3.0 Unit	0,00	0,00	1.234.901.500,00	-	Sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
						[Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat]																	
	1	02	02	2.01	00 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
	1	02	02	2.01	00 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1	02	02	2.01	00 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1	02	02	2.01	00 22	Pengembangan Rumah Sakit																	

							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah				2 Unit	1 Unit	2.550.000.000,00	504.472.876,00	504.472.876,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			1.545.340.207,84	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

							sakit															
	1	02	02	2.01	00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	5 Paket	12.500.000.000,00	11.766.781.623,00	11.934.146.406,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan dari BLUD Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			10.600.247.132,69	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1	02	02	2.02	00 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
	1	02	02	2.02	00 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	

	1	02	02	2.02	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
	1	02	02	2.02	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
	1	02	02	2.02	00 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
	1	02	02	2.02	00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
	1	02	02	2.02	00 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
	1	02	02	2.02	00 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																

							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	145.656.000,00	19.175.000,00	19.175.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			113.299.963,70	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik																	
							Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem			3.604.998.845,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Pelayanan Dengan Menggunakan SIM-RS di RSUD Kabupaten Asmat	-			100 %	95 %	340.048.800,00	335.689.200,00	335.689.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Asmat		360.499.884,50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.03	00 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	340.048.800,00	335.689.200,00	321.883.800,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			360.499.884,50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguku ran Indikator Mutu Nasional Pada RSUD	-			95 %	95 %	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Asmat		25.749.991,75	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan				-	100 %	211.848.000,00	1.217.432.000,00	1.243.107.000,00							1.598.082.000,00	
						-	-	-	-	-			211.848.000,00	1.217.432.000,00	1.243.107.000,00						-	1.598.082.000,00	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																	

	J U M L A H											80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			85.227.592.891,55	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
						[Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan]	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100	100	100			211.848.000,00	1.217.432.000,00	1.243.107.000,00						100	1.598.082.000,00	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD	-			85 %	100 %	211.848.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo		517.650.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

	1	02	03	2.03	00 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				**6 Orang**	**7 Orang**	**211.848.000,00**	**137.000.000,00**	**162.675.000,00**	**Kab. Asmat, Agats, Semua Kel/Desa**	**Pendapatan dari BLUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat**			**517.650.000,00**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

1. Memperhatikan 6 (Enam) arahan Presiden dan 8 (Delapan) Agenda Prioritas Nasional sebagai berikut:
   a. Arahan Presiden
      1) Perencanaan strategis dan berkelanjutan;
      2) Ekonomi Pancasila sebagai prinsip pengelolaan ekonomi;
      3) Kedaulatan pangan dan energy;
      4) Pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi;
      5) Good governance, pengendalian korupsi dan aparat yang bertanggung jawab;
      6) Pendekatan berbasis rakyat yang realistis serta evaluatif.
   b. Arahan Presiden tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam 8 (Delapan) Agenda prioritas Nasional meliputi:
      1) Ketahanan Pangan;
      2) Ketahanan Energi;
      3) Makan Bergizi Gratis;
      4) Pendidikan Bermutu;
      5) Kesehatan Berkualitas;
      6) Ekonomi Rakyat dan UMKM;
      7) Pertahanan Semesta;
      8) Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2026

   Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Papua Selatan menetapkan arah pembangunan tahunan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah. RKPD disusun berdasarkan permendagri yang terbaru, evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, serta RPJMD Provinsi Papua Selatan 2025-2029. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai dan

sejahtera

Fokus Strategis antara lain:

1. Pengelolaan Data Terpadu (Satu Data Indonesia – SDI): Pemerintah mendorong penyediaan data akurat, lengkap dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengmabilan keputusan. Data mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, lingkungan dan kondisi wilayah serta data spesifik Orang Asli Papua (OAP) untuk perencanaan yang tepat sasaran;
2. Pemberdayaan dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP): Pemerintah menitikberatkan pembangunan yang merata dan ilusif dengan focus pada perlindungan hak OAP, peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi serta sosial budaya mereka sesuai dengan kebutuhan lokal
3. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik: RKPD mencakup pembangunan infrastruktur vital, termasuk transportasi, energy dan fasilitas pemerintahan, untuk memperkuat konektivitas , akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan akses layanan publik
4. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: prioritas pembangunan menekankan penciptaan kesempatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga kesejahteraan warga Papua Selatan meningkat.

3. Pembangunan Kabupaten Asmat Tahun 2026 bertemakan pada "**Asmat Maju dan Sejahtera di Selatan Papua, berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata budaya melalui pemberdayaan masyarakat guna kemandirian local Kab. Asmat"**, dengan prioritas daerah terdiri dari:
   1) Penguatan ekonomi local berbasis pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya local, difokuskan pada:
      a. Peningkatan pemberdayaan pelaku perikanan tangkap dan budidaya serta peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
      b. Penignkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya
      c. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi perikanan tangkap dan budidaya

d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan tangkap dan budidaya
e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pembudidaya perikanan
f. Peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing
g. Pengembangan kewirausahaan dan produktivitas usaha kecil dan koperasi
h. Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis local
i. Pelatihan peningkatan mutu konsumsi hasil pangan local
j. Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis perkebunan
k. Pemberian bantuan bibit tanaman pangan perkebunan
l. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
m. Pengembangan kampong wisata berbasis budaya
n. Pengembangan objek daya tarik wisata alam dan budaya
o. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dlam mendukung pengembangan sector pariwisata

2) Peningkatan skil dan partisipasi masyarakat dalam sector ekonomi, di fokuskan pada:
a. Pemanfaatan sumber daya alam local yang tereksplorasisecara optimal dan pemanfaatan keunikan karakteristik kewilayahan sebagai modal dasar pembangunan
b. Membangun aplikasi yang menginformasikan dengan system pelayan perizinan, peluang investasi dan tata ruang wilayah
c. Penguatan koordinasi ijin penanaman modal, sehingga investor sesuai dengan fungsi dan peruntukan ruang
d. Menjalin kerjasama penyediaan energy listrik ke pihak swasta dan BUMN
e. Menjalin kerjasama sumber daya mineral daerah
f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pemudidaya perikanan
g. Peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing

h. Peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja
i. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
j. Peningkatan fasilitas hubungan industrial
k. Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan pemerintahan berbasis kearifan local
l. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil

3) Pengentasan kemiskinan, difokuskan pada:
a. Peningkatan partisipasi angkatan kerja
b. Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis local
c. Pelatihan peningkatan mutu konsumsi hasil pangan local
d. Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis perkebunan
e. Pemberian bantuan bibit tanaman pangan perkebunan
f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertaninan
g. Peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja
h. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
i. Peningkatan fasilitas hubungan industrial
j. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat
k. Meningkatkan ketersediaan dan mutu tenaga pendidik
l. Meningkatkan minat baca masyarakat
m. Pengembangan kualitas dan metode pembelajaran
n. Pengembangan kualitas pendidikan non formal dan formal
o. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayana kesehatan dasar di puskesmas, pustu dan polindes
p. Pengembangan kebijakan kesehatan lingkungan
q. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
r. Pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
s. Peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Asmat

4) Konektivitas wilayah, yang difokuskan pada:
a. Pembangunan jalan jalan dan jembatan baru yang menjadi akses ekonomi wilayah

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatanmelalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
c. Meningkatkan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada
d. Penyediaan solar cell di distrik dan kampong
e. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi energy local
f. Peningkatan pembangunan tower celuler sampai ke kampong kampong
g. Peningkatan penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah asmat pada media media local dan regional

5) Pembangunan pusat pemerintahan baru, yang difokuskan pada:
   a. Membangun komunikasi intensif dan setara antara eksekutif dan DPRD
   b. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat dan pusat pemerintahan baru
   c. Membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai stakeholder tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
   d. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
   e. Meningkatkan kualitas pelayanan penatausahaan keuangan daerah yang lebih professional
   f. Penguatan penyediaan data-data daerah sektoral dan spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
   g. Peningkatan kerjasama pembangunan
   h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN Asmat melalui peningkatan jenjang pendidikan formal
   i. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil
   j. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan
6) Infrastruktur (focus pembangunan akses bandara dan lingkar kota), yang difokuskan pada:

a. Meningkatkan infrastruktur jaringan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah
b. Mengembangkan sarana infrastruktur pengairan yang memadai
c. Meningkatkan pemenuhan akses listrik di seluruh wilayah
d. Meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan informasi telekomunikasi.

Tabel 3.1
Telaah Arah Kebijakan dan Prioritas Bidang Kesehatan Kementerian Kesehata Republik Indonesia, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan serta RSUD Perpetua J. Safanpo

No.	Arah KebijakanKementerian Kesehatan Republik Indonesia	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan	Arah Kebijakan RSUD Perpetua J. Safanpo
1	Transformasi layanan rujukan berkualitas	Pemenuhan dan peningkatan mutu fasilitas rumah sakit sesuai standar	Meningkatkan Kualitas SumberDaya Manusia Kesehatan
2	Pemenuhan SDM dan fasilitas RS sesuai standar	Peningkatan akses pelayanan rujukan di daerah 3T	Mengoptimalkan Pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat
3	Penguatan sistem ketahanan kesehatan (resiliensi RS terhadap bencana/ KLB)	Akreditasi RS dan Penerapan Indikator mutu	Meningkatkan Jumlah SDM Kesehatan
4	Perluasan layanan JKN dan Terintegrasi SPGDT	Peningkatan kompetensi SDM dan Jaminan sosial tenaga kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Pelayanan berbasis teknologi	RS sebagai wahanan pendidikan dan rekrutmen lpkal tenaga medis	Melakukan Promosi Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

a. Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
2. Regulasi tata kelola yang berintegritas dan Adaptif

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
2. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Untuk Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dapat di lihat pada table di bawah Ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D							
- Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif - Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) (%)		
		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)		
					Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyediaan Sarana prasarana, Alkes, Obat-obatan dan Makanan Minuman pada Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
				Terlaksananya Pelayanan Dengan Menggunakan SIM-RS RSUD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksannya Pengukuran Indikator Mutu Nasional Pada RSUD	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		Meningkatkan Mutu Tenaga Kesehatan			Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan		Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Nilai Hasil LKJP (SAKIP) (Angka)		
			Presentase Administrasi Penunjang Urusan RSUD		Nilai Hasil LKJP (SAKIP) (Angka)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Belanja Pegawai dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksannya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Terlaksannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam Rencana Kerja Perubahan Perubahan perangkat daerah (RKPD) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan:

1. Volume Pasien Tinggi: RSUD sering menghadapi tingginya volume pasien rawat jalan yang menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang lama.
2. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.
3. Infrastruktur dan Teknologi: Keterbatasan dalam infrastruktur dan teknologi medis yang canggih dapat menghambat pelayanan yang optimal.
4. Lemahnya kemampuan membayar masyarakat karena tidak memiliki jaminan kesehatan masih cukup tinggi.
5. Masih tingginya rujukan pasien ke luar daerah akibat kekurangan tenaga dokter spesialis

Peluang:

1. Pengembangan Layanan Digital: Implementasi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.
2. Kerjasama dengan Pihak BPJS Kesehatan dapat membantu dalam penyediaan dana dan sumber daya tambahan dari klaim jaminan kesehatan.
3. Program Pemerintah: Dukungan dari program-program pemerintah pusat dan daerah dapat membantu dalam peningkatan fasilitas dan layanan.
4. Mengusulkan bagi masyarakat tidak mampu untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan melalui jaminan kesehatan daerah maupun jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat
5. Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk penempatan Dokter spesialis maupun Dokter Residen di RSUD Kabupaten Asmat

Dengan memahami tantangan dan peluang ini, RSUD dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam Rencana Kerja Perubahan Perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Program Dan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah Urusan Kesehatan di kabupaten Asmat adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatannya:
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatanya:
   a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan kegiatanya:
   a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpoadalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatannya:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatannya:
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatanya:
   a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota
   b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Rumah Sakit dan RKPD telah dijabarkan pada BAB sebelumnya, sedangkan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KAB. ASMAT

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D							80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96							85.227.592.891,55	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96							85.227.592.891,55	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96							85.227.592.891,55	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Layanan Administrasi Penunjang Urusan RSUD				100 %	100 %	32.114.297.414,39	34.390.604.056,96	34.400.414.056,96							36.806.444.391,55	
						[Presentase Administrasi Penunjang Urusan RSUD]	Nilai Hasil LKJP (SAKIP)	79.80	78.93	78.93			32.114.297.414,39	34.390.604.056,96	34.400.414.056,96						79.00	36.806.444.391,55	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	1	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Asmat, Agats, Kaye	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			360.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			7.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	20 Laporan	248.128.000,00	231.630.000,00	346.440.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			248.128.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			30.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000.000,00	7.087.200.000,00	6.619.570.361,52	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			8.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				12 Bulan	95 %	48.495.671.835,61	40.936.228.107,00	54.209.479.312,00							46.823.066.500,00	
						-																	

	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sarana prasarana, Alkes, Obat-obatan dan Makanan Minuman Pada Fasilitas Layanan Kesehatan	-			95 %	95 %	19.371.267.035,61	15.627.626.999,00	15.627.626.999,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Asmat		16.706.586.367,03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				-	3.0 Unit	0,00	0,00	1.234.901.500,00	-	Sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
						[Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat]																	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																	

							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	1 Unit	2.550.000.000,00	504.472.876,00	504.472.876,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Infrastruktur Dasar			1.545.340.207,84	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	5 Paket	12.500.000.000,00	11.766.781.623,00	11.934.146.406,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan dari BLUD Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			10.600.247.132,69	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	

	1	0 2	0 2	2.0 2	001 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	
	1	0 2	0 2	2.0 2	001 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	0 2	0 2	2.0 2	001 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	0 2	0 2	2.0 2	001 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
	1	0 2	0 2	2.0 2	002 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
	1	0 2	0 2	2.0 2	003 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
	1	0 2	0 2	2.0 2	003 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	145.656.000,00	19.175.000,00	19.175.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			113.299.963,70	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik																	
							Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem			3.604.998.845,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Pelayanan Dengan Menggunakan SIM-RS di RSUD Kabupaten Asmat	-			100 %	95 %	340.048.800,00	335.689.200,00	335.689.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Asmat		360.499.884,50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

																	penyandang disabilitas.					
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	340.048.800,00	335.689.200,00	321.883.800,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			360.499.884,50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanany a Pengukuran Indikator Mutu Nasional Pada RSUD	-			95 %	95 %	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Asmat		25.749.991,75	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatny a Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan				-	100 %	211.848.000,00	1.217.432.000,00	1.243.107.000,00							1.598.082.000,00	

						-	-	-	-	-			211.848.000,00	1.217.432.000,00	1.243.107.000,00					-	1.598.082.000,00	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																
	J U M L A H												80.821.817.250,00	76.544.264.163,96	89.853.000.368,96	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat			85.227.592.891,55	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
						[Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan]	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100	100	100			211.848.000,00	1.217.432.000,00	1.243.107.000,00						100	1.598.082.000,00	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanany a Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD	-			85 %	100 %	211.848.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo		517.650.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				**6 Orang**	**7 Orang**	**211.848.000,00**	**137.000.000,00**	**162.675.000,00**	**Kab. Asmat, Agats, Semua Kel/Desa**	**Pendapatan dari BLUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat**			**517.650.000,00**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang partisipatif dan terintegrasi, menggabungkan pendekatan bottom-up dari unit-unit pelayanan serta pendekatan top-down yang selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Penyusunan Renja ini juga mengacu pada berbagai regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, baik di tingkat kabupaten maupun nasional.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026, fokus utama kegiatan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Perpetua J. Safanpo. Upaya ini mencakup penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengadaan peralatan medis yang memadai. Diharapkan, ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan penerimaan rumah sakit.

Selain itu, pengembangan layanan baru yang telah dilengkapi dengan tenaga medis spesialistik dan paramedis, serta dukungan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, menjadi pilar penting dalam memperluas cakupan dan kualitas layanan. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan dan keberlanjutan operasional rumah sakit, diperlukan serangkaian upaya strategis yang secara langsung memperkuat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan. Upaya-upaya tersebut antara lain: penyediaan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai, obat-obatan, serta dukungan operasional kegiatan; peningkatan mutu layanan kesehatan yang prima; penyesuaian tarif layanan berdasarkan perhitungan unit cost yang rasional; serta pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit secara aktif dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan berbagai upaya tersebut, diharapkan RSUD Perpetua J. Safanpo mampu meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber fungsional, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung pengembangan rumah sakit secara berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Asmat, khususnya dalam menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah Papua Selatan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 ini juga memuat evaluasi atas pelaksanaan program kerja tahun 2025 dan capaian Renstra 2021–2025, yang menjadi dasar dalam menyusun prioritas kegiatan tahun berjalan. Evaluasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan, terutama pada program-program strategis yang belum mencapai target optimal. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan strategis bagi manajemen rumah sakit.

Lebih jauh, Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, mengenai arah dan prioritas pembangunan kesehatan di RSUD Perpetua J. Safanpo. Dengan demikian, seluruh unit kegiatan diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen ini juga menjadi acuan penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026.

Melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini, RSUD Perpetua J. Safanpo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memperluas akses layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Asmat.

Agats, 28 Agustus 2026

Direktur
RSUD Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat

drg. Yenny Yokung Yong, MDSc, Sp. Perio
NIP. 19790124 200801 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO
Jl. Zegward Distrik Agats – Asmat
Email : rsudakatasmat@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO
KABUPATEN ASMAT
NOMOR: 1056a TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2026-2030
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO
KABUPATEN ASMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4245);

4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523); diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; diubah lagi dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RKPD.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

13. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Asmat

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
c. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
d. OPD dalam keputusan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat
e. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi.

f. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD
g. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat.
h. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai sengan program dan kebijakan yang ditetap kan.
i. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pasal 3

a. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.

b. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan ;
b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

1) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2025-2029.
2) IKU OPD paling kurang memuat Indikator Keluaran (Output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas
3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jugamempertimbangkan beberapa hal yaitu:
   a. Kebutuhan Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja;
   b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
   c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Direktur Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Agats
Pada tanggal : 29 September 2025
Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat

Drg. Yenny Yokung Yong, MDSc.Sp. Perio
Pembina/IVa
NIP. 19790124 200801 2 011

Lampiran: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Nomor 1056a Tahun 2025
Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030
Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Rumus Perhitungan	SATUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	Indeks Kepuasan Pasien (IKP) Terhadap Pelayanan Kesehatan	= Total Unsur Yang Terisi / Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x 25 (Nilai Penyeimbang)	Kinerja
			Persentase RS Pemerintah terakreditasi Paripurna	= Jumlah RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna / Jumlah RS Pemerintah yang ada x 100%	%
		Meningkatkan Mutu Tenaga Kesehatan	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	= Jumlah dokter spesialis yang tersedia / Jumlah dokter spesialis sesuai standar x 100%	%

Ditetapkan Di : Agats
Pada tanggal : 29 September 2025
Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat

Drg. Yenny Yokung Yong, MDSc.Sp. Perio
Pembina/ IVa
NIP. 19790124 200801 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO
Jalan Zegward Distrik Agats-Asmat
Email; rsudakatasmat@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO
KABUPATEN ASMAT
NOMOR: 0170 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2026

Menimbang :

a. Mengingat RPJMD Kabupaten Asmat dan Renstra OPD Tahun 2025-2029 belum ditetapkan sebagaimana pedoman penyusunan RKPD dan Renja OPD, berpedoman pada arah kebijakan, prioritas 2025-2029 yang tertuang dalam RPJPD tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 , serta nantinya secara simultan akan disempurnakan dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 dan Rancangan Akhir Renstra OPD tahun 2025-2029, maka perlu disusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi papua dan papua Barat;
4. Undang-Undang no 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
11. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050 tahun 2020 tentang pemetaan, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang pemetaan, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Asmat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Asmat;
14. Peraturan Bupati Asmat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Asmat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nornor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat tahun 2025-2045

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 31 Januari 2025

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO
KABUPATEN ASMAT

Drg. Yenny Yokung Yong, MDSc. Sp. Perio
Pembina
NIP. 19790124 200801 2 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat Nomor 0170 Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat	Drg. Yenny Yokung Yong, MDSc. Sp. Perio
2	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum	Hendrik Wijaya, A.MKL
3	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	Lanny Yulia M Lasol E, SKM
		Kepala Seksi Keperawatan dan Asuhan Keperawatan	Markus Nokir Sandadua, AMK
		Kepala Seksi Logistik Keperawatan	Irma, S. Farm, Apt

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 31 Januari 2025

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO
KABUPATEN ASMAT

Drg. Yenny Yokung Yong, MDSc. Sp. Perio
Pembina
NIP. 19790124 200801 2 011